

Lampiran 1:

Masukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Indonesia Maju masabakti 2019-2024

1. Latar belakang dan pentingnya melakukan upaya efisiensi energi

- a. Efisiensi energi adalah kegiatan yang paling mudah dilakukan dan menggunakan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang lain, seperti pembangunan pembangkit energi terbarukan, pengolahan limbah rumah tangga, dan lain-lain. Efisiensi energi juga menurunkan biaya produksi sehingga penerapannya akan meningkatkan keuntungan dan produktivitas.
- b. Keterpurukan beberapa sektor industri di Indonesia, mulai dari tekstil, baja, dan semen, antara lain adalah dikarenakan masih tingginya jumlah energi per satuan produk yang digunakan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, karena itu penggalakan lagi implementasi efisiensi energi mutlak harus dilakukan.
- c. Efisiensi energi harus dilakukan di segala bidang dan sektor di Indonesia, baik di sisi pasokan maupun permintaan, karena masyarakat Indonesia masih boros dalam menggunakan energi. Secara nasional, elastisitas energi Indonesia (perbandingan antara laju permintaan energi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi) masih di atas 1, sehingga perlu untuk diturunkan.
- d. Pelaksanaan dan upaya serta keseriusan untuk menerapkan efisiensi energi oleh pemerintah dan pelaku usaha jauh lebih rendah daripada apa yang dilakukan untuk energi terbarukan, seperti pembangkit tenaga surya, bahan bakar nabati, *waste to energy*, dan lain-lain.
- e. Perlu untuk memberikan masukan kepada Presiden Indonesia dan Kabinet Indonesia Maju agar efisiensi energi diimplementasikan di semua sektor di seluruh Indonesia.

2. Masukan untuk kebijakan

- a. Data dan basis data untuk perencanaan dan implementasi efisiensi energi perlu lebih dicermati dan diperkuat agar perancangan kebijakan efisiensi energi dan indikator pencapaian target kebijakan tidak salah arah.
- b. Perlu kebijakan yang lebih agresif, terintegrasi dan dengan rencana aksi/peta jalan yang jelas untuk implementasi efisiensi energi. Revisi dari Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2009 harus dipercepat dengan tujuan yang lebih terfokus untuk beberapa hal sebagai berikut:
 - Dukungan pemerintah untuk percepatan implementasi efisiensi energi di beberapa sektor industri, terutama di industri lahap energi seperti semen, tekstil, petrokimia, dan baja.
 - Target efisiensi energi yang terukur dan transparan untuk tiap jenis industri.

- Model pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang terhubung dengan target pengurangan emisi nasional.
- c. Penegakan peraturan efisiensi energi yang saat ini diatur oleh PP 70/2009, mulai dari pelaporan konsumsi energi sampai capaian implementasi efisiensi energi dan sanksi bagi yang melanggarnya, perlu untuk diperkuat. Kriteria pelaku usaha yang mempunyai kewajiban untuk melakukan implementasi dan pelaporan efisiensi energi juga harus diperketat dengan ukuran dan standar yang jelas dengan menggunakan kriteria energi per satuan produk yang ditetapkan secara partisipatif oleh kementerian terkait.
- d. Kebijakan energi dan keuangan yang bertentangan dengan implementasi kegiatan efisiensi energi nasional harus dihilangkan, seperti contohnya Peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2017 tentang Operasi Daya Paralel yang sangat menghambat implementasi efisiensi energi di industri, dan peraturan lain yang sejenis.
- e. Kebijakan disinsentif untuk pengguna energi, terutama industri dan bangunan komersial, layak untuk diimplementasikan guna meningkatkan kepatuhan pada peraturan dan mendorong pelaku untuk melakukan kegiatan efisiensi energi.
- f. Kebijakan untuk pemberian insentif fiskal atau insentif bentuk lain bagi kegiatan efisiensi energi adalah prioritas berikutnya, terutama apabila pemerintah memiliki anggaran.
- g. Standar dan label hemat energi, terutama pada peralatan rumah tangga, bangunan komersial, dan kendaraan bermotor perlu untuk diperluas dan diperbanyak. Standar hemat energi ini harus menggunakan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi spesifik Indonesia.
- h. Energi efisiensi di sektor transportasi perlu digali lebih lanjut potensinya, terutama dengan implementasi kendaraan listrik, hydrogen, dan kendaraan motor bakar dengan efisiensi tinggi. Di sektor rumah tangga, program kompor induksi dapat dikaji lebih lanjut khususnya untuk penerapan di Jawa dan Bali.

3. Masukan untuk model pendanaan

- a. Pendanaan melalui perbankan untuk implementasi efisiensi energi saat ini sulit untuk dilakukan karena terkendala dengan peraturan *collateral* dan bunga pinjaman yang tinggi. Untuk itu perlu dibuat skema pendanaan khusus untuk efisiensi energi dari perbankan atau lembaga keuangan.
- b. Perlu penyesuaian dengan kondisi Indonesia untuk mendorong pendanaan efisiensi energi dengan menggunakan skema *Energy Services Company* (ESCO).
- c. Insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk dan pengurangan pajak harus dilakukan untuk peralatan-peralatan efisiensi energi.

- d. Model pembiayaan dengan menggunakan pajak karbon atau mekanisme berbasis pasar karbon, bisa menjadi alternatif untuk pemberian insentif maupun disinsentif pada pengguna energi dengan skala tertentu yang disepakati.
- e. Pajak karbon perlu untuk dikaji dan kemudian diimplementasikan untuk sektor-sektor transportasi dan industri, dengan melalui perencanaan terintegrasi antar kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian.
- f. Kerjasama internasional dalam bidang efisiensi energi perlu untuk diprioritaskan dan difasilitasi oleh pemerintah.

4. Masukan untuk keberlanjutan implementasi program efisiensi energi

- a. Implementasi efisiensi pada pengguna energi, terutama sektor bisnis, akan meningkatkan keberlanjutan dari kegiatan bisnis dan secara langsung memberi pengaruh positif pada lingkungan sekitar.
- b. Efisiensi energi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan target jangka panjang di semua sektor pembangunan. Untuk itu akan dibutuhkan standar, regulasi, dan model pembiayaan yang fleksibel.
- c. *Energy pricing* atau pengaturan harga energi sesuai dengan nilai keekonomiannya dengan dibarengi sosialisasi, kampanye dan program insentif akan secara langsung meningkatkan kegiatan efisiensi energi serta keberlanjutan program efisiensi energi nasional.
- d. Peningkatan kampanye, diseminasi, dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat harus dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan terencana untuk pencapaian target efisiensi energi.

Jakarta, 2 Desember 2019

Jejaring Indonesia Rendah Emisi